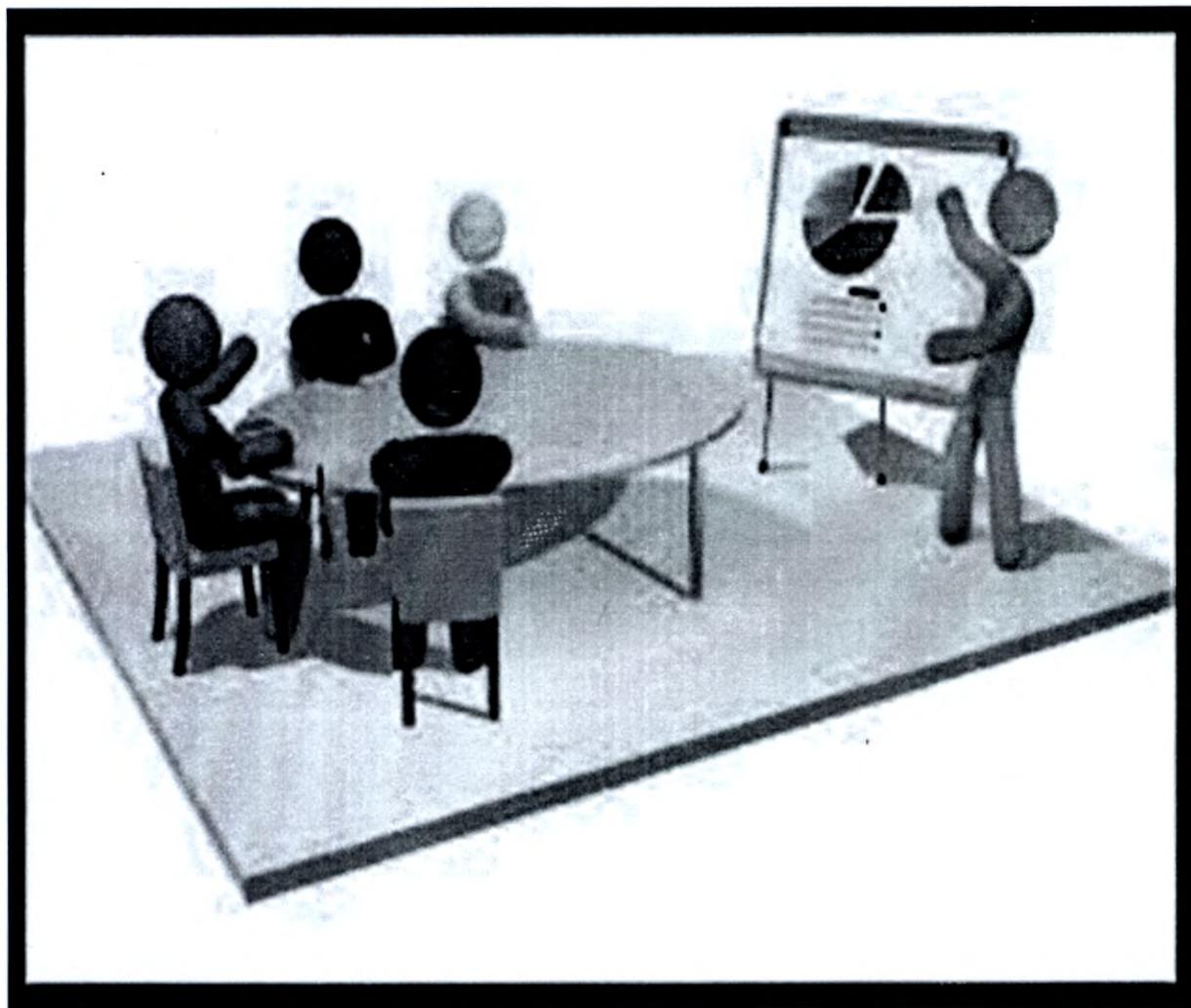




# **Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
2021**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**NOMOR      TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2022 menjadi tolak ukur kinerja pelayanan selama 1 (satu) tahun rencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021;
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2021;
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
  13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;
  14. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 24.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan landasan bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja pelayanan Bappeda.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tuapejat  
Pada tanggal : 2 Agustus 2021

Plt.Kepala,



Nazipan, S.Ag  
NIP. 196703111998032004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Inspektor Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dapat disusun.

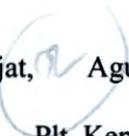
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain RKPD Tahun 2022 dan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta mengakomodir usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui penjaringan aspirasi pada musrenbang.

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam arah perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat,  Agustus 2021

Plt. Kepala,



Nazipah, S.Ag  
NIP. 19670311 199803 2 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda .....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda .....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda .....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	28
3.1 Telaahan Terhadap Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).....	29
3.3 Program dan Kegiatan .....	30
BAB IV PENUTUP .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu, tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Rencana Kerja OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja yang definitif. Setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan

Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan rencana kerja (Renja) Bappeda tahun 2022 juga memperhatikan dan telah menyesuaikan perubahan urusan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 2 urusan, yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian pengembangan.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD, dimana pada pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator, target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Perencanaan yang baik dan matang akan menghasilkan pembangunan yang terencana, berhasil dan berdaya guna serta berdampak pada kemakmuran masyarakat. Secara umum, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2022 memuat kerangka rencana

pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 dimaksudkan untuk:

1. Menyelaraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkret kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 adalah:

1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
3. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan;** berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

**BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu;** berisikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;** berisikan uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan.

**BAB IV Penutup;** berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 dan 2020 Capaian Renstra Bappeda**

Proses penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Hasil evaluasi yang dilakukan akan diperoleh dua hal penting, antara lain sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses pembangunan selama 5 (lima) tahun, yang dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja di tahun berikutnya. Berikut ini hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun berjalan.

**EVALUASI PELAKUANAN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
Periode Pelaksanaan Tahun 2020

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana OPD Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2018 s/d 2022				Target Rencana OPD Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2018 s/d 2022				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Kriteria dan Anggaran Rencana Perbaikat				Realisasi Capaian Kinerja dan Kriteria dan Anggaran Rencana Perbaikat								
				Realisasi Capaian Kinerja Rencana OPD Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2018 s/d 2022				Target Rencana OPD Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2018 s/d 2022				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Kriteria dan Anggaran Rencana Perbaikat				Realisasi Capaian Kinerja dan Kriteria dan Anggaran Rencana Perbaikat								
				1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	14	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	Statistik	Program pengembangan data/tinjauan/evaluasi/statistik daerah	Terselesainya dokument profil daerah	3	dokumen	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	2	14	15	Penyosanan rintik Uewah	Publikasi Data Pembangunan	72 kali	1.330.000.000	98,46	223.500.000	12,00	159.180.000	0	0	1,00	3.550.000	0	0	11,00	155.328,50	12,00	158.878.500	100,00	99,81	110,86	382.386.500	153,97	20,90	
2	14	15	16	Facilitasi Penelitian, Pengembangan dan Peneropan IPTEK	Terfaksamanya rapat kerja dengan instansi terkait dan lks sektor terkait pengembangan data dan informasi	12 kali	seminar	2.420.000.000	98,49	1.216.519,068	2,00	250.355,436	0	0	2,00	9.121,436	0	0	0	241.137,79	2,00	250.259,226	100,00	99,96	100,49	1.486.778.294	837,42	60,61
2	14	15	36	Pemeliharaan Sistem Informasi/Aplikasi BAPPEDA	Terpimpilnya Sistem Informasi/Aplikasi Informasi/Aplikasi	28 aplikasi	460.000.000	0	0	7,00	125.115,000	0	0	0	6,00	116.875,000	1,00	0	125.115,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25	27,20		
4	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI</b>		Rate-rata Capaian Kinerja (%)																				75	74,94			
2	4	3	1	Perencanaan	Program Pengabean Administrasi Beraudiaan	18 rekruting	3.165.000.000	96,59	912.314,458	3,00	455.713,000	0	0	3,00	216.195,148	0	0	75.735,305	0	163.360,221	3,00	165.290,642	100,00	99,81	99,59	1.367.665,040	553,28	43,21
4	3	1	02	Penyelesaian isla komunikasi, kimbare daya arer dan strukt	Jumlah ketetaraan dinaas yang layak jalan	34 unit	1.592.000.000	100	123.280.000	6,00	130.000.000	0	0	2,00	44.604,000	0	0	4,00	85.390,000	6,00	128.994,000	100,00	100,00	100,00	253.274.000	311,76	42,78	
4	3	1	06	Penyelesaian isla pemeliharaan dan peritinau kenderaan dinas/opersational	Terbayaranya pengeluaran administrasi perkantoran	12 PNS	4.422.900.000	99,87	514.827,883	20,00	654.384,000	19,0	100.482,700	0	0	113.338,250	0	92.988,250	1,00	253.068,000	20,00	260.077,200	100,00	85,59	119,87	1.074.905,083	99,89	24,30
4	3	1	07	Penyelesaian isla administrasi keuangan	Terbayaranya isla keberoperahan laik	10 jenls	1.146.000.000	99,70	155.505,467	10,00	54.410,000	0	0	4,00	18.240,000	0	0	6,00	35,970,000	10,00	54.410,000	100,00	100,00	100,00	209.815,467	105,48	18,32	
4	3	1	08	Penyelesaian isla keberoperahan laik	Jumlah ATK yang disediakan	4	1.056.800.000	100	145.937,075	18,00	180.790,150	18,0	179.370,350	0	0	0	0	92.000,000	18,00	187.790,350	0	100,00	118,00	316.725,075	110,28	29,79		
4	3	1	10	Penyelesaian datu tulis kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	7	1.113.753,000	100	171.240,850	6,00	179.808,900	6,00	98.888,900	0	0	26.630,800	0	0	0	54.289,200	6,00	179.808,900	100,00	100,00	100,00	351.049,750	294,44	31,52
4	3	1	11	Penyelesaian barang cetakan dan penggandaan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 jenls	103.910,000	100	11.892,000	6,00	17.972,500	0	0	0	0	0	0	0	17.972,500	6,00	17.972,500	100,00	100,00	100,00	29.465,000	265	28,74	
4	3	1	15	Penyelesaian bahan berasaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah pertemuan/rapat yang diselakuan	40 jenls	218.392,500	92,24	18.162,000	6,00	35.000,000	0	0	1,00	2.000,000	2,00	7.160,000	3,00	25.840,000	6,00	35.000,000	100,00	98,24	53.162,000	245,60	24,34		
4	3	1	17	Penyelesaian makanan dan minuman	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke kure daerah	12 kali	1.520.000.000	87,79	649.498,220	20,00	300.000.000	0	0	8,00	80.127,414	2,00	41.468,800	10,00	178.390,20	20,00	296.986,414	100,00	100,00	100,00	111,98	237.775,900	155,53	
3	4	3	2	Program Pengabean Seuna dan Prasara Ajaratu	Jumlah perakitan gedung kantor	11 jenis	270.000.000	0	0	4,00	95.420,000	0	0	0	0	0	0	0	95.030,000	4,00	95.030,000	100,00	99,59	4,00	95.030,000	36,36	35,20	
4	3	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Gedung kantor yang dipertahira	3 unit	601.000.000	99,97	264.350,628	1,00	190.920,000	0	0	0	0	0	1,00	190.561,889	1,00	190.561,889	100,00	99,81	100,97	454.912,527	3,95	75,69		
4	3	2	22	Pemeliharaan ruang/bertala gedung kantor	Mobil jebat yang dipertahira	19 unit	63.600.000	95,97	71.976,608	3,00	67.500,000	0	0	1,00	10.898,600	2,00	56.599,059	3,00	67.497,659	100,00	100,00	100,00	139.474,267	520,89	21,86			
4	3	2	23	Pemeliharaan ruang/bertala mobil jebat	Kendaraan dinas operasional yang dipertahira	13 unit	227.000,000	100	13.000,000	3,00	9.000,000	0	0	1,00	2.980,000	2,00	9.000,000	3,00	9.000,000	100,00	100,00	100,00	22.000,000	792,31	9,69			
4	3	2	24	Pemeliharaan ruang/bertala kendaraan dinas operasional	Jumlah pertemuan/rapat yang dipertahira	17 jenis	280.000,000	100	146.000,000	3,00	19.000,000	0	0	0	0	0	0	0	19.000,000	3,00	19.000,000	100,00	100,00	100,00	165.000,000	605,88	58,93	
4	3	2	26	Pemeliharaan ruang/bertala pertanggungan kantor	Dokumen Perencanaan Prototipe Kantor Cemati	1 Dokumen	149.451,000	0	0	1,00	114.137,500	0	0	0	0	0	1,00	113.697,95	1,00	113.697,95	100,00	99,61	1,00	113.697,95	100,00	76,08		
4	3	2	34	Perencanaan Prototipe Kantor Cemati																				223,11	35,51			



Perencanaan yang baik akan memperoleh hasil yang maksimal, sehingga pada tahap akhir proses evaluasi akan didapatkan beberapa pokok/inti permasalahan yang menjadi perbaikan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya kesamaan pandangan dan dukungan dari seluruh bidang-bidang. Sebelum dimulainya kegiatan pada awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Performance Plan) sebagai Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2020. Rencana kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik di tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan. Dengan penyusunan rencana kerja yang memadai akan memudahkan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap periode pelaksanaan sekaligus sebagai umpan balik penyusunan rencana kerja tahun berikutnya dengan mengacu pada Visi dan Misi unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator pencapaian target kinerja diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran dalam suatu tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan urusan Pemerintahan, untuk melaksanakan urusan pemerintahan ini pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 4 (empat) Program dan 41 (empat puluh satu) Kegiatan.

Adapun perencanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2020, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar *Rp. 12.515.752.798,-* dan terealisasi sebesar *Rp. 12.062.247.864,-* atau sebesar *96.37 %*. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 yang sebesar *Rp 12.382.930.493,-* atau sebesar *97,48%*.

Dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 4.202.903.694 terealisasi sebesar Rp. . 3.755.982.245 (89.37%) dan dari anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.218.349.104,- terealisasi sebesar Rp. 8.212.155.619 (99.92%) serta dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 94.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.110.000 (96.35%).

Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari 4 (empat ) Program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2020 didukung oleh 10 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.113.703.750,- dengan realisasi Rp.2.109.219.296 atau sebesar *99.79 %*.

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pencapaian Program Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun

anggaran 2020 didukung oleh 6 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 495.977.500,- dengan realisasi Rp. 494.787.508 atau sebesar 99,76 %.

### **3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

Pencapaian Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2020 didukung oleh 4 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 534.650.436,- yang terealisasi Rp. 534.252.726,- atau sebesar 99.93 %.

### **4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pencapaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai tahun anggaran 2020 didukung oleh 21 kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.159.121.418,- yang terealisasi Rp. 6.146.046.539 atau sebesar 99.79 %.

Untuk kegiatan yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan, keberhasilan pencapaian ini dikarenakan oleh dukungan sumber daya manusia, dan waktu yang sesuai dengan rencana kegiatan.

Rencana kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 merupakan penjabaran dari rencana strategis Bappeda tahun 2017-2022. Hal ini berarti optimalisasi perencanaan rencana kerja tahun 2020 pada penuntasan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022. Hasil pencapaian pada evaluasi kinerja hingga tahun 2020 menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun kebijakan rencana strategis untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

## **1.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda**

Penilaian hasil kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota) dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
			Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat program urusan pilihan yang terintegrasi	100%	100	100	100	100	100	60	65	70	75	85	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
2	Tingkat kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	100	100	100	100	100	65	70	75	85	90	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
3	Tingkat kesesuaian program RKPD kedalam APBD	100%	100	100	100	100	100	65	70	80	85	95	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
4	Tingkat Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	20%	9	10	12	15	20	10	15	18	20	22	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %	>100 %
5	Tingkat kajian/penelitian yang diterapkan	2%	0.8	1	1.5	1.8	2	1	1.5	1.8	2	2.2	>1 %	>1 %	>1 %	>1 %	>1 %

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Belanja	10.140,76	11.615,80	10.845,14	15.900,33	21.764,10	5.567,80	6.444,41	7.588,90	14.249,60	20.412,04	54,91	55,48	69,98	89,62	93,79	22,85	41,13
Belanja Tidak Langsung	1.946,17	2.287,82	2.527,12	2.833,28	2.889,86	1.628,07	2.286,33	2.432,96	2.804,74	2.879,30	83,66	99,93	96,27	98,99	99,63	10,53	16,20
Belanja Langsung	8.194,58	9.327,98	8.318,02	13.067,04	18.874,24	3.939,73	4.158,07	5.155,93	11.444,86	17.532,74	48,08	44,58	61,99	87,59	92,89	26,13	51,18

### **1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda**

Sejalan dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan otonomi daerah, Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai perencana pembangunan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain itu, juga selalu berupaya mengantisipasi isu yang berkembang di masyarakat dalam bentuk mewujudkan program-program kegiatan yang selaras.

Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap dan terukur.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel
3. Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan.
4. Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah belum optimal.
5. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum diiringi dengan peningkatan pembiayaan yang signifikan, sehingga pencapaian kegiatan pembangunan perlu dilakukan secara bertahap dengan pengalokasian anggaran pembangunan secara proporsional di antara OPD.

6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program.
7. Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD.
8. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
9. fungsi dan peran fungsional perencana dan peneliti di Bappeda belum optimal.

Permasalahan dan kendala yang dialami Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas pokok fungsinya harus sedini mungkin diatasi agar tidak *mendistorsi* upaya percepatan pembangunan yang telah ditargetkan. Rekomendasi yang diberikan sebagai catatan strategis dalam meminimalisir permasalahan tersebut adalah:

1. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan.
2. Meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta mengintegrasikan proses politik sejak awal dan mensinkronkan waktu reses DPRD dengan tata cara waktu perencanaan dan penganggaran.
4. Peningkatan efektifitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan.

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas											
										Nasional	Daerah										
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																				
5 0 1	<b>PERENCANAAN</b>					8,803,000,000						9,215,000,000									
5 0 1 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	0	0	100	6,303,000,000						100	6,510,000,000								
5 0 1 01 2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan	layanan	layanan	2 layanan	3,600,000,000						2 layanan	3,750,000,000								
5 0 1 01 2. 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan			27 ASN	3,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	27 ASN	3,400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
5 0 1 01 2. 02 02	Penyediaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Pelaksanaan Tugas ASN			27 orang	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN	27 orang	350,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
5 0 1 01 2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	layanan	layanan	8 layanan	863,000,000						8 layanan	880,000,000								

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Tahun 2022**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah						
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dan Jenis Komponen Listrik yang Dibutuhkan			10 jenis	18,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 jenis	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat-alat Kebersihan kantor Tersedianya ATK Tersedianya Makan Minum Kantor			12 jenis 5 Jenis 24 Kali	290,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 jenis 5 Jenis 24 Kali	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan			6 jenis	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 jenis	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan/Surat Kabar yang dibutuhkan			6 jenis	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 jenis	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
5 0 1 01 2. 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri				36 kali	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 kali	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 0 1 01 2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya layanan pemeliharaan Barang milik Daerah	layanan	layanan	1 layanan	600,000,000							1 layanan	600,000,000	
5 0 1 01 2. 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Pagar			1 paket	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 paket	600,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 0 1 01 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	layanan	layanan	2 layanan	770,000,000							2 layanan	780,000,000	
5 0 1 01 2. 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan Sewa Mesin Genset PLN yang dipakai			3 rekening 4 kali	420,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	opd	3 rekening 4 kali	420,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Nasional	Daerah						
5 0 1 01 2. 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Honorer Bappeda				19 orang	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	opd	19 orang	360,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 0 1 01 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanyanya layanan pemeliharaan Barang Milik daerah	layanan	layanan	layanan	4 layanan	470,000,000						4 layanan	500,000,000			
5 0 1 01 2. 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara				3 unit	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 unit	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 0 1 01 2. 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas layak jalan jumlah mobil jabatan yang dipelihara				3 unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 unit	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Tahun 2022**

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Daerah						
5	0	01	2.	09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor			1 unit	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0	01	2.	09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara			3 jenis	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 jenis	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0	02				<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH</b>	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	0	0	100	<b>1,600,000,000</b>					100	<b>1,705,000,000</b>		
5	0	02	2.	01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan daerah	Layanan	Layanan	2 Layanan	<b>800,000,000</b>					2 Layanan	<b>850,000,000</b>		
5	0	02	2.	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terfasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kabupaten			10 Kecamatan 1 kali	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Kecamatan 1 kali	550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2022**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah						
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD				Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	02	2.02	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					350,000,000						400,000,000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terkelolanya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Pelatihan Aparatur Perencana			1 aplikasi 1 Kali	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 aplikasi 1 Kali	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pelatihan pemanfaatan data GIS			1 Paket	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Paket	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2022**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
											Nasional	Daerah							
5	0	1	02	2.	03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan		Layanan	1 Layanan	450,000,000					1 Layanan	455,000,000		
5	0	1	02	2.	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi RKPD			1 Dokumen	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	455,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	0	1	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD			100	900,000,000					100	1,000,000,000		
5	0	1	03	2.	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan MANusia	kali		kali	4 kali	300,000,000				4 kali	300,000,000		

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Tahun 2022**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
											Nasional	Daerah							
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2023 dan Perubahan 2021	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2023 dan Perubahan 2021				Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2023 dan Perubahan 2022	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2023 dan Perubahan 2022			12 kali	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 kali	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	kali		kali	4 kali	300,000,000					4 kali	300,000,000		
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan tahun 2023 dan perubahan 2022				4 kali	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 kali	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Tahun 2022**

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional	Daerah					
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Kerja Pemerintah Daerah Bidang Sumber Daya Alam				Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen 150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah daerah TAHUN 2023 bldang Infrastruktur dan Kewilayah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	300,000,000					1 Dokumen 400,000,000		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Eavaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kebinaragaan dan Perhubungan			10 kali	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 kali 200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan			10 kali	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 kali 200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>					750,000,000						805,000,000	

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKP D Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP D Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah				
5 0 5 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan			1.8	750,000,000						1.8	805,000,000		
5 0 5 02 2. 03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	Persen	80 Persen	750,000,000						80 Persen	805,000,000		
5 0 5 02 2. 03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD		450,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5 0 5 02 2. 03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya Dokumen Kajian Ekonomi Bidang Infrastruktur Publik			1 Dokumen	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	355,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
TOTAL						9,553,000,000							10,020,000,000		

## **1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disesuaikan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan permasalahan yang ada pada Renstra, Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai, RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pencapaian program nasional yang terkandung dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam perencanaan program dan kegiatannya masih fleksibel. Artinya, masih dapat menerima/menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Nasional.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022, arah dan kebijakan perencanaan pembangunan tertuang dalam misi pembangunan RPJMN 2020-2024, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Selaras dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 juga memperhatikan arah dan prioritas pembangunan nasional yang mengutamakan pembangunan infrastruktur (konektivitas), kedaulatan pangan dan kemaritiman. Prioritas pembangunan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
5. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.
6. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
7. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

8. Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan konektifitas dan pengembangan wilayah.
9. Penanggulangan bencana alam, dan pelestarian lingkungan hidup.

Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam setiap rencana kerja perencanaan pembangunan daerah, mengutamakan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan terus berupaya untuk ditingkatkan melalui pelbagai mekanisme perencanaan pembangunan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

Perubahan Rencana strategis Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2022 memuat tujuan dan sasaran strategis yang menjadi landasan rencana kerja tahunan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka perlu dijabarkan kembali tujuan dan sasaran rencana kerja yang lebih operasional agar lebih terarah dan terukur.

terukur. Berdasarkan Perubahan rencana strategis tahun 2017-2022, maka Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Bappeda  
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang berkualitas	Persentase realisasi kinerja yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan	Meningkatnya integrasi perencanaan pembangunan	Program urusan pilihan yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Kesesuaian program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya porsi perencanaan partisipatif dalam pembangunan	Usulan masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	8%	9%	10%	12%	15%	20%
			Meningkatnya hasil kajian/inovasi dan penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Kajian/penelitian yang diterapkan	0,7%	0,8%	1%	1,5%	1,8%	2%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Kepulauan Mentawai dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 selain program dan kegiatan rutin, terdapat program dan kegiatan utama yang menjadi arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun 2022. Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Tahun 2022**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
5 0 1	PERENCANAAN								9,972,835,323			10,259,000,000		
5 0 1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,742,835,323			6,794,000,000		
5 0 1 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,346,163,323			3,450,000,000		
5 01 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	27 ASN	100 persen	8,121,617,323	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	3,200,000,000
5 01 01 2.0 2 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terbayarnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	27 orang	100 persen	224,546,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	250,000,000
5 0 1 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								300,000,000					300,000,000
5 01 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Pelatihan Penggunaan Drone Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur Perencana	Meningkatnya kapasitas aparatur PNS	Kab. Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 Paket 1 kali	80 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	300,000,000

5	0	1	01	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah						879,000,000					884,000,000		
5	01	01	2.0	6	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Dan Jenis Komponen Listrik yang Dibutuhkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	12 jenis	100 Persen	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	24,000,000
5	01	01	2.0	6	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya Alat-alat Kebersihan kantor Tersedianya ATK Tersedianya Makan Minum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	12 jenis 5 Jenis 24 Kali	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	300,000,000
5	01	01	2.0	6	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibutuhkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	6 jenis	100 Persen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	125,000,000
5	01	01	2.0	6	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan/Surat Kabar yang dibutuhkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	6 jenis	100 Persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	35,000,000
5	01	01	2.0	6	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	36 kali	100 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	400,000,000
5	0	1	01	2.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						770,000,000					770,000,000		

5	01	01	2.0	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya Kendaraan Operasional (Motor Dinas)	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 unit	100 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	20,000,000
5	01	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya Kamera kelegakan zoom Tersedianya Laptop Tersedianya PC Tersedianya Tripot Kamera	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	3 unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	100,000,000
5	01	01	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Pemasangan CCTV Kantor Pembuatan Pagar Tersedianya Tangga Lipat	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 Paket 1 paket 1 Unit	100 Persen	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	650,000,000
5	01	01	2.0	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>827,672,000</b>				<b>840,000,000</b>
5	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Rekening yang dibayarkan Sewa Mesin Genset PLN yang dipakai	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	3 rekening 4 kali	100 Persen	420,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	420,000,000
5	01	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terbayarnya Gaji Tenaga Honorer Bappeda terbayarnya vakasi supir, jaga malam dan Sekretaris Pribadi	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	19 orang 5 orang	100 Persen	407,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	420,000,000
5	01	01	2.0	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>620,000,000</b>				<b>550,000,000</b>

5	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	2 unit	100 Persen	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	120,000,000	
5	01	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas layak jalan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 unit	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	110,000,000	
5	01	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terpeliharanya gedung kantor	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 unit	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	200,000,000	
5	01	01	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Lancarnya Operasional Perkantoran	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	3 jenis	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100	120,000,000	
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>									<b>1,830,000,000</b>					<b>1,965,000,000</b>
5	01	02	2.0	1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>									<b>1,000,000,000</b>					<b>1,060,000,000</b>

5	01	02	2.0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Terlaksananya Konsultasi Publik (ranwal RKPD)	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 kali	100 Persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100	210,000,000
5	01	02	2.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Terfasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kabupaten	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	10 Kecamatan 1 kali	100 Persen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100	550,000,000
5	01	02	2.0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	2 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100	300,000,000
5	01	02	2.0 2		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							380,000,000					<b>450,000,000</b>
5	01	02	2.0 2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Terkelolanya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Pelatihan Aparatur Perencana	menjadi pedoman dalam informasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 aplikasi 1 Kali	2 dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	250,000,000
5	01	02	2.0 2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Pelatihan Operator Simpul Jaringan	menjadi pedoman dalam informasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	36 OPD	2 dokumen	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	200,000,000
5	01	02	2.0 3		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							450,000,000					<b>455,000,000</b>

5	01	02	2.0	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Tersedianya Dokumen Evaluasi RKPD	Dijadikan Sebagai Dasar Evaluasi Pembangunan Daerah	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 Dokumen	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100	455,000,000	
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>												1,500,000,000	
5	01	03	2.0	1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>												800,000,000	
5	01	03	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan tahun 2023 dan Perubahan 2021	Menjadi Acuan Untuk untuk perencanaan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	250,000,000	
5	01	03	2.0	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Penyusunan Grand Design Kependudukan Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia Tersusunnya Ranperda (KLA dan PUG)	Menjadi Acuan Untuk untuk perencanaan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 Dokumen 12 kali 2 Ranperda	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	550,000,000	
5	01	03	2.0	2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>												300,000,000	
5	01	03	2.0	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	Menjadi Acuan Untuk untuk perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	4 kali	1 dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	150,000,000

5	01	03	2.0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Tersusunnya Dokumen Kerja Pemerintah Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Menjadi Acuan Untuk untuk perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	150,000,000
5	01	03	2.0 3	03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>								<b>300,000,000</b>					<b>400,000,000</b>
5	01	03	2.0 3	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kebinaragaan dan Perhubungan	Dapat menjadi acuan penyusunan RKPD dan RENJA OPD	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	10 kali	80 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	200,000,000
5	01	03	2.0 3	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan	Dapat menjadi acuan penyusunan RKPD dan RENJA OPD	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	100	10 kali	80 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD	100	200,000,000
5	0				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>								<b>1,510,188,98</b>					<b>1,580,000,00</b>
5	0				<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>								<b>1,510,188,98</b>					<b>1,580,000,00</b>
5	0	02	2.0 2	02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>								<b>610,188,981</b>					<b>630,000,000</b>
5	05	02	2.0 2	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Percentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	Tersedianya Kajian Ekonomi di Bidang Pariwisata	menjadi pedoman dalam pengembangan pelayanan dibidang sosial dan kependudukan	Kab. Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.8	1 Dokumen	1 Dokumen	310,188,981	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	1.8	320,000,000

5	05	02	2.0	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	tersedianya dokumen indek kepuasan masyarakat	menjadi pedoman dalam pengembangan pelayanan dibidang sosial dan kependudukan	Kab. Kepulauan Mentawai Sipora Utara, Tuapejat	1.8	1 Dokumen	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	1.8	310,000,000	
5	0	02	2.0	3	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>							900,000,000					950,000,000	
5	05	02	2.0	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	terlaksananya kajian terhadap pisang, keladi dan hasil laut	Menjadi Pedoman Dalam Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.8	1 dokumen	80 Persen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	1.8	450,000,000
5	05	02	2.0	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	Tersedianya Dokumen Kajian Ekonomi Bidang Infrastruktur Publik	Menjadi Pedoman Dalam Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Kepulauan Mentawai Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.8	1 Dokumen	80 Persen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian Sesuai Kebutuhan Perencanaan	1.8	500,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>11,483,024,304</b>					<b>11,839,000,00</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan pelbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi pelbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil dan yang termarjinalkan benar-benar dikedepankan.

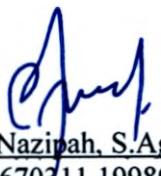
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, rencana kerja Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja

di masa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tuapejat, 2 Agustus 2021

Plt. Kepala,



Nazipah, S.Ag  
NIP. 19670311 199803 2 004